

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Oloan Sitorus Dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003

Imamkoeswahyono, *Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008

Mudakir iskandarsyah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, Hal 6

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 105.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005),
halaman.7.

Sri Martosoewignjo, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan
Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*,
(Bandung : Alumni, 1987), halaman. 8-9.

B. Internet

Republika Go.id

Website PN-wates go.id

Detik News.Online

Tirto.id

Suara.com

C. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Kepentingan Umum

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 174/Pdt.P.K/2017/PN.Wat